



Judul : Belajar MBG ke India: BGN sebaiknya contoh Jepang
Tanggal : Senin, 03 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Belajar MBG Ke India BGN Sebaiknya Contoh Jepang

ANGGOTA Komisi IX DPR Arzeti Bilbina meminta Badan Gizi Nasional (BGN) meninjau ulang rencana menjadikan India sebagai role model dalam peningkatan mutu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan tersebut perlu dikaji secara mendalam dan transparan.

Arzeti menjelaskan, dari data Global Hunger Index (GHI) 2025, India berada di peringkat 102 dari 123 negara dengan kategori "serius". Data tersebut jadi indikator kelaparan dan gizi India masih rendah.

Dia lantas mempertanyakan alasan menjadikannya model untuk MBG. "Kita tentu boleh belajar dari negara lain, tetapi keputusan kebijakan harus berbasis bukti dan sesuai konteks Indonesia," ujarnya di Jakarta, Minggu (2/11/2025).

Legislator Fraksi PKB itu juga mempertanyakan pihak yang memberi rekomendasi kepada BGN soal India. Harus ada penjelasan mengenai dasar kajian, hingga mekanisme pemilihan. Jangan sampai kebijakan publik diambil tanpa transparansi.

Sebagai alternatif, dia menyarankan BGN belajar dari negara-negara dengan manajemen gizi terbaik di dunia. Seperti negara-negara dengan skor GHI sangat rendah dan program makan sekolah yang berhasil berdasarkan laporan World Food Programme (WFP) dan School Meals Coalition.

Dia menguraikan, lima negara dengan manajemen gizi terbaik di dunia. Pertama, Finlandia sukses menurunkan obesitas dan kekurangan gizi melalui integrasi data sekolah, layanan kesehatan, dan program makan gratis berbasis lokal.

Kedua, Jepang. Negara itu menerapkan pendidikan gizi atau shokuiku dan makan siang sekolah bergizi seimbang yang mendukung kesehatan anak. "Ketiga, Norwegia yang memiliki sistem pangan berkelanjutan dengan pengawasan gizi nasional yang kuat," jelasnya.

Keempat, Belanda. Negeri Kincir Angin dikenal dengan pola makan sehat berbasis nabati dan kebijakan publik gizi yang terintegrasi. Terakhir, Korea Selatan memimpin Asia dalam indeks ketahanan gizi berkat manajemen pangan lokal dan regulasi ketat pada makanan olahan.

"Negara-negara itu sudah terbukti menjaga ketahanan pangan dan gizi warganya dengan sistem yang efisien dan transparan," katanya.

Penolakan juga disampaikan Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chantago. Dia menyoroti catatan kelam program serupa di India. Dia mengingatkan publik tentang tragedi

pada 2013, di mana 25 anak meninggal dunia usai mengonsumsi makanan gratis dari sekolah. Sehingga, kerja sama untuk program MBG dengan India dinilai tidak tepat.

Politikus Partai NasDem itu membandingkan insiden tersebut dengan kasus keracunan massal MBG di Indonesia baru-baru ini. Meskipun Indonesia belum berpengalaman dalam MBG dan masih menghadapi banyak kasus keracunan, situasinya tidak separah di India karena tidak sampai merenggut korban jiwa.

"Di negara kita yang belum pengalaman mengelola MBG, masih lebih baik, meskipun korban keracunan banyak tapi tidak sampai menelan korban jiwa," terangnya. ■ PYB